



BOS Daerah Akan Diberikan Tiap Bulan

Agar Sekolah Tak Kesulitan Menyesuaikan Kebijakan Bebas Biaya

YOGYAKARTA, KOMPAS — Menyusul kebijakan pemerintah untuk membebaskan biaya operasional SD dan SMP, Pemerintah Kota Yogyakarta akan mencairkan bantuan operasional sekolah daerah setiap bulan secara rutin. Pencairan dana pertama rencananya dilakukan pada awal Februari.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Syamsuri, Minggu (18/1), mengatakan, pencairan bantuan operasional sekolah (BOS) daerah setiap bulan dilakukan untuk mengantisipasi sekolah kehabisan dana operasional. Apalagi mengingat BOS APBN kerap terlambat turun 1-2 bulan.

Menurut Syamsuri, pencairan setiap bulan itu dimaksudkan sebagai pengganti format sumbang-

an penyelenggaraan pendidikan (SPP). Dengan pencairan setiap bulan, sekolah diharapkan tidak mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan kebijakan sekolah bebas biaya.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Budi Asrori menuturkan, pencairan diperkirakan baru bisa dilakukan paling cepat awal Februari. Saat ini, pencairan masih menunggu penge-

sahan APBD Kota Yogyakarta. "Kami harap, akhir Januari sudah bisa disahkan sehingga dana bisa turun secepatnya," katanya.

Pencairan dana BOS daerah mendesak dilakukan. Hal ini karena, sejak Januari, SD dan SMP di Kota Yogyakarta tidak lagi diperbolehkan memungut biaya apa pun. Adapun BOS APBN diperkirakan baru turun bulan Maret. Apabila lambat, dikhawatirkan sejumlah SD-SMP kehabisan dana.

Kegiatan rutin

Menurut Budi, dana BOS daerah bulanan ini diprioritaskan untuk kegiatan rutin sekolah. Besarnya Rp 250.000 per tahun per murid untuk tingkat SD dan Rp 625.000 per tahun per anak untuk tingkat SMP. Jumlah ini telah di-

sesuaikan dengan kekurangan BOS APBN untuk memenuhi unit cost pendidikan. "Ditambah BOS APBN, tiap murid SD akan memperoleh Rp 600.000 per tahun, sedangkan untuk SMP Rp 1,2 juta per tahun," tuturnya.

Budi mengemukakan, pencairan akan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah berdasar kegiatan akademiknya. "Jadi, dana tidak serta-merta dibagi 12," ujarnya.

Hal ini dilakukan karena sekolah memiliki siklus pembiayaan. Pada bulan-bulan mendekati ujian nasional atau ulangan umum, misalnya, biaya operasional sekolah biasanya meningkat. "Kebutuhan sekolah bisa dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah atau APBS," katanya.

(IRE)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Forpi			

Yogyakarta, 16 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005